

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah hak dan investasi semua warga negara. Untuk menjamin kesehatan, diperlukan suatu sistem yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan warga negara untuk tetap hidup sehat. Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan tumpuan masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan mendasar selain pangan dan juga pendidikan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pelayanan kesehatan yang peduli dan terpusat pada kebutuhan, harapan serta nilai-nilai pelanggan, sebagai titik tolak penyediaan pelayanan kesehatan dan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Sebagai pengguna jasa pelayanan, masyarakat berharap mendapatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, berkualitas serta merata dan nondiskriminatif, sehingga hak-hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan tersebut dapat terlindungi (Irmawati al et., 2019).

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan

produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional (Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan kepada masyarakat maka di setiap kecamatan dibangun instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes No. 75 Tahun, 2014).

Puskemas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum, mereka harus memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) atau Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan (Irmawati et al., 2019).

Untuk itu perlu adanya upaya penguatan, pemenuhan sumber daya puskesmas, upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pemenuhan sarana,

prasarana dan alat kesehatan. Berdasarkan data dari Aplikasi Sarana Dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) yang di dapat dalam laporan kinerja kesehatan kota padang tahun 2022, masih terdapat 27% puskesmas di kabupaten/kota dengan pemenuhan Sarana Prasarana Alat kesehatan (SPA) yang belum sesuai standar (Kemenkes, 2022).

Peralatan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan diharuskan memiliki sistem yang baik dalam menyediakan alat kesehatan. Kebutuhan yang meningkat akan memaksa puskesmas menjaga sistem manajemen alat kesehatan agar tidak ada gangguan dalam pelayanan. Tidak tersedianya alat kesehatan atau alat kesehatan yang ada tidak digunakan dengan baik oleh puskesmas akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Oleh karena itu, kondisi maupun fungsi dari sarana fisik alat kesehatan tersebut harus dalam keadaan baik dan dapat mendukung pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, perlu adanya manajemen logistik untuk menjaga kualitas dalam jumlah yang sesuai dengan memperhatikan standar (Papatung et al., 2020).

Manajemen logistik merupakan proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan serta penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari supplier, kepada para langganan. Sebaliknya, manajemen logistik di puskesmas didefinisikan sebagai suatu proses pengolahan secara strategis terhadap pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemantauan persediaan

bahan (*stock, material, supplies, inventory* dll) yang dibutuhkan bagi produksi jasa puskesmas (Bhakti et al., 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian, ditemukan masih terdapat Puskesmas yang terkendala dalam ketersediaan alat kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Papatungan, dkk dengan judul Evaluasi Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas UPTD Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020. Dalam segi input menunjukkan bahwa, terdapat kendala pada sarana prasarana pengangkutan alat kesehatan yang masih menggunakan *Ambulance*, SDM yang kurang memadai. Presentasi ketersediaan sarana prasarana di puskesmas masih berkisar 70%, sementara SDM pengelola logistik alat kesehatan sebagian besar masih di rangkap oleh petugas kesehatan Puskesmas UPTD Pinolosian. Dalam segi proses evaluasi Logistik Alat Kesehatan Puskesmas yang meliputi Perencanaan, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan, dan Penghapusan. Pada perencanaan, dilaksanakan setiap tahun di awal periode dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan puskesmas. Namun dalam segi pemeliharaan dan penghapusan barang dalam hal ini alat kesehatan belum terlaksana dengan baik karena belum terprogram. Melihat dari segi pemeliharaan yang belum ada petugas khusus, dan untuk penghapusan alat kesehatan yang sudah tidak terpakai belum terprogram dengan baik. Pada output, ketersediaan alat di puskesmas UPTD pinolosian masih kurang lengkap, masih ada beberapa fungsi logistik yang belum maksimal. Antara lain pengadaan alat kesehatan yang terbatas, penghapusan belum mencakup seluruh alat kesehatan yang

rusak, dan program pemeliharaan alat kesehatan yang di nilai masih kurang (Paputungan et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dengan judul Analisis Manajemen Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas Boja II tahun 2018, hasil penelitian diperoleh masih terdapat kendala dalam sarana prasarana dan SDM. Presentase ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas masih berkisar 70%. SDM pengelola logistik alat kesehatan sebagian besar masih dirangkap oleh petugas kesehatan, sehingga beban kerja mereka meningkat. Masih terdapat kendala pada penyimpanan alat kesehatan yaitu tidak adanya gudang penyimpanan alat-alat kesehatan, sehingga beberapa barang ada yang diletakkan di aula puskesmas. Ketersediaan alat kesehatan di puskesmas Boja II masih kurang lengkap dengan membandingkan pada kompondium alat kesehatan yang telah dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI (Ramadhan, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati, dengan judul Evaluasi Pengelolaan Alat Kesehatan Di Puskesmas Basala Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021. Didapatkan hasil penelitian, bahwa ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas masih belum memenuhi standar 80%, di mana dalam data SPA Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, tentang ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas Basala tahun 2020 baru mencapai 53,92% dan pada tahun 2021 mencapai 66,25 %. Hal itu disebabkan pengusulan alat kesehatan ke Dinas Kesehatan belum sepenuhnya lengkap, sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan bahwa kelengkapan alat di Ruang

Pemeriksaan Umum masih ada beberapa yang tidak tersedia, pada Ruang UGD, Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut (Konawe et al., 2022).

Berdasarkan laporan dari Instalasi Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Padang dari 24 Puskesmas yang ada di Kota Padang, ada beberapa Puskesmas yang sarana prasarana alat kesehatannya masih rendah, salah satunya Puskesmas Air Dingin. Puskesmas Air Dingin melakukan Perencanaan dan Pengadaan logistik Alat Kesehatan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Padang, di Puskesmas ini masih banyak terdapat alat kesehatan, sarana dan prasarana yang rusak dan tidak tersedia.

Hasil survey awal di Puskesmas Air Dingin yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2024 dengan melakukan wawancara kepada salah satu petugas Penanggung Jawab Rumah Tangga, didapatkan informasi bahwa tidak ada ruangan khusus untuk penyimpanan alat kesehatan di Puskesmas Air Dingin. Alat kesehatan di serahkan pada penanggung jawab masing-masing bagian, kemudian di letakan dalam ruangan masing-masing, sesuai kebutuhan. Untuk pengendalian, jika ada barang yang rusak, yang menggunakan alat tersebut melapor pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPK menghubungi petugas service, jika alat kesehatan yang rusak tersebut masih bisa di perbaiki alat tersebut akan dipergunakan kembali, namun jika tidak akan dikembalikan ke aset untuk di lakukan penghapusan. Pencatatan dan pelaporan alat kesehatan di lakukan dalam aplikasi BMD (barang milik daerah) dalam bentuk KIB (kartu identitas barang). Pengadaan alat kesehatan bersumber dari dana BLUD.

Berdasarkan Profil Puskesmas Air Dingin tahun 2023 di dapatkan bahwa ada alat kesehatan yang mengalami kerusakan, seperti tensi meter dengan ketersediaan 17 alat yang mengalami kerusakan 5 alat, otoscope dengan ketersediaan 5 alat yang mengalami kerusakan 2 alat (Profil Puskesmas Air Dingin Tahun 2023)

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Analisis Manajemen Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas Air Dingin Kota Padang tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Manajemen Logistik Alat Kesehatan Di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Manajemen Logistik Alat Kesehatan Di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui Perencanaan Manajemen Logistik Alat Kesehatan Di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024.
- b. Diketahui Pengadaan Manajemen Logistik Alat Kesehatan Di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024.

- c. Diketahui Pemeliharaan Manajemen Logistik Alat Kesehatan Di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024.
- d. Diketahui Penghapusan Manajemen Logistik Alat Kesehatan Di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024.
- e. Diketahui Penatausahaan Manajemen Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bentuk pengaplikasian pengetahuan yang didapat selama kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber, penunjang, ataupun referensi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Manajemen Logistik Alat Kesehatan Di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Sebagai bahan bacaan dan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Puskesmas Air Dingin

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, Puskesmas Air Dingin dapat menjadikan ini sebagai salah satu pedoman evaluasi pelayanan

kesehatan lebih terkhususnya pada perencanaan manajemen logistik alat kesehatan.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas tentang Analisis Manajemen Logistik Alat Kesehatan Di Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2024. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Maret-Agustus tahun 2024. Teknik penentuan informan yaitu dengan *Purposive Sampling* yang melibatkan sebanyak 5 informan yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Petugas Logistik, Petugas Farmasi, Petugas Laboratorium. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dari hasil wawancara terstruktur dan observasi membandingkan hasil wawancara dengan hasil yang tampak nyata, data sekunder di dapatkan dari laporan Puskesmas Air Dingin. Sedangkan analisis data dilakukan menggunakan metode *Trianggulasi sumber* dan *Trianggulasi Metode*.